

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
III. A.		URUSAN PERIKANAN RUMUSAN KEBIJAKAN dibidang : Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Peningkatan Daya Saing					
		1. Pengkajian dan pengusulan kebijakan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		2. Penyiapan bahan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		3. Perumusan kebijakan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		4. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		5. Penetapan kebijakan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		PERIKANAN TANGKAP					
B.		1. Pengelolaan Sumber Daya Ikan					
		a. Data dan Statistik Perikanan Tangkap	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		1) Pengumpulan dan pengolahan 2) Analisis dan Kebijakan					

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		2) Administrasi perusahaan penangkapan ikan					
		c. Verifikasi dan Analisis Dokumen Penangkapan Ikan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		1) Verifikasi dokumen penangkapan ikan perusahaan perikanan berbadan hukum					
		2) Verifikasi dokumen penangkapan ikan perusahaan perorangan dan koperasi					
		3) Pemantauan dan evaluasi pelayanan usaha penangkapan ikan					
		4) Pemantauan pelayanan usaha penangkapan ikan					
		5) Evaluasi pelayanan usaha penangkapan ikan					
		d. Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		1) Penerbitan dokumen penangkapan ikan					
		2) Tata laksana dokumen penangkapan ikan					
		e. Pemantauan dan evaluasi pelayanan usaha penangkapan ikan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		1) Pemantauan pelayanan usaha penangkapan ikan					
		2) Evaluasi pelayanan usaha penangkapan ikan					
		3) Data statistik tahunan usaha penangkapan ikan					
		f. Harmonisasi dan evaluasi perizinan Pusat dan Daerah	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		5. Pengembangan Usaha Penangkapan					
		a. Kelembagaan Usaha	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		1) Tata laksana kelembagaan					
		2) Kerjasama usaha					

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
C.		b. Investasi dan Pemodalan Usaha	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		1) Tata laksana investasi dan pemodalan usaha 2) Bimbingan investasi dan pemodalan usaha					
		c. Kenelayanan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		1) Identifikasi dan kapasitas nelayan 2) Bimbingan nelayan					
		d. Pembinaan pengelolaan usaha	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		1) Bimbingan pengelolaan usaha 2) Bimbingan diversifikasi usaha					
		e. Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		1) Pemantauan usaha penangkapan ikan 2) Evaluasi usaha penangkapan ikan					
		PERIKANAN BUDIDAYA					
		1. Prasarana dan Sarana Budidaya					

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		a. Lahan dan Air 1) Identifikasi potensi 2) Penataan b. Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar 1) Standardisasi 2) Pemantauan dan evaluasi c. Prasarana dan Sarana Budidaya Air Payau 1) Standarisasi 2) Pemantauan dan evaluasi d. Prasarana dan Sarana Budidaya Air Laut 1) Standarisasi 2) Pemantauan dan evaluasi e. Minapolitan budidaya	Terbatas Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum Terbuka untuk Internal dan Eksternal Terbuka untuk Internal dan Eksternal Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup Terbuka Terbuka Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>e. Informasi dan Distribusi Perbenihan</p> <p>1) Informasi perbenihan 2) Distribusi perbenihan 3. Produksi</p>	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		<p>a. Budidaya air tawar</p> <p>1) Standarisasi 2) Penerapan teknologi budidaya air tawar</p>	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		<p>b. Budidaya air payau dan laut</p> <p>1) Standarisasi 2) Penerapan teknologi budidaya air payau dan laut</p>	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		5. Usaha budidaya					
		a. Investasi dan permodalan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		1) Investasi					
		2) Permodalan					
		b. Kewirausahaan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		1) Bimbingan Usaha					
		2) Kemitraan					
		c. Pelayanan Usaha	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		1) Perizinan					
		2) Pemantauan dan evaluasi					
		d. Kelembagaan dan ketenagakerjaan	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		1) Kelembagaan					
		2) Ketenagakerjaan					
		e. Informasi usaha dan promosi	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		1) Informasi usaha					
		2) Promosi					
		f. Data statistik tahunan budidaya ikan laut, payau dan air tawar	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		a. Kelembagaan 1) Kelembagaan pelaku pasar hasil perikanan 2) Kelembagaan pasar hasil perikanan b. Analisis dan informasi pasar dalam negeri 1) Analisis pasar dalam negeri 2) Informasi pasar dalam negeri c. Jaringan distribusi dan kemitraan 1) Jaringan distribusi 2) Kemitraan d. Promosi dan kerja sama 1) Promosi	Biasa/Terbuka Terbatas Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum Terbuka untuk Internal dan Eksternal Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka Tertutup Terbuka Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		1) Promosi	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		2) Kerja sama	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		5. Usaha dan investasi					
		a. Pelayanan usaha	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		1) Pelayanan usaha mikro, kecil dan menengah					
		2) Pelayanan usaha besar					
		b. Kemitraan Usaha	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		1) Kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah					
		2) Kemitraan usaha besar					
		c. Ketenagakerjaan pengolahan dan pemasaran	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		1) Tenaga kerja pengolahan					
		2) Tenaga kerja pemasaran					

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
E.		d. Investasi dan permodalan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		1) Investasi 2) Permodalan					
		e. Informasi dan promosi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		1) Informasi 2) Promosi					
		KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL					
		1. Tata Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil					
		a. Rencana Tata Ruang Laut Daerah dan Perairan Yurisdiksi	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		1) Rencana tata ruang laut daerah kabupaten					

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
F.		2) Akses nonbank					
		b. Akses ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		1) Identifikasi ilmu pengetahuan dan teknologi 2) Implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi					
		c. Sosial budaya masyarakat	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		1) Penguatan kelembagaan masyarakat 2) Peningkatan peran serta masyarakat					
F.	PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	d. Pengembangan usaha	Biasa/Terbuka	Terbuka untuk Internal dan Eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun	Unit Pengolah Terkait
		1) Pelayanan usaha 2) Usaha mikro					
		1. Pengawasan Sumber Daya Perikanan					
		a. Pengawasan pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran b. Pengawasan usaha budidaya					
		2. Pengawasan sumber daya kelautan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>a. Pengawasan ekosistem perairan dan kawasan konservasi</p> <p>1) Pengawasan ekosistem perairan 2) Pengawasan kawasan konservasi</p>	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		<p>b. Pengawasan pencemaran perairan</p> <p>1) Pengawasan pencemaran pesisir laut dan pesisir pantai 2) Pengawasan pencemaran perairan umum dan pedalaman</p>	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		<p>c. Pengawasan pesisir dan pulau-pulau terkecil</p> <p>1) Pengawasan pesisir 2) Pengawasan pulau-pulau terkecil</p>	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		d. Pengawasan jasa kelautan dan sumber daya non hayati 1) Pengawasan jasa kelautan 2) Pengawasan sumber daya non hayati 3. Kapal Pengawas a. Logistik dan operasional pengawasan b. Perawatan kapal pengawas c. Pengawakan kapal pengawas 4. Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan a. Sistem pemantauan 1) Pengembangan sistem pemantauan 2) Kerjasama pemantauan	Terbatas Biasa/Terbuka Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum Terbuka untuk Internal dan Eksternal Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup Terbuka Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		b. Pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan 1) Operasional sistem pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan 2) Analisis hasil pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		c. Pemantuan pemanfaatan sumber daya perikanan 1) Operasional sistem pemantauan pemanfaatan sumber daya perikanan 2) Analisis hasil pemantauan pemanfaatan sumber daya perikanan	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait
		d. Pengembangan infrastruktur pengawasan 1) Penyiapan infrastruktur	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		2) Evaluasi infrastruktur 5. Penanganan pelanggaran a. Penyidikan b. Penanganan barang bukti dan awak kapal c. Kerjasama penegakan hukum dan fasilitas PPNS perikanan <ul style="list-style-type: none"> 1) Kerjasama penegakan hukum 2) Fasilitas PPNS perikanan d. Pemantauan dan evaluasi <ul style="list-style-type: none"> 1) Pemantauan 2) Evaluasi 	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan	Unit Pengolah Terkait